

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2017**

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN									
NO	JUDUL	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN/ PENERBIT INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			RETENSI ARSIP	Link
					CETAK	REKAM	ONLINE		
1.	Profil Badan Publik	1. Informasi Tentang Kedudukan/ Domisili/ Alamat lengkap; 2. visi, dan misi; 3. Tugas dan Fungsi; 4. Struktur organisasi; 5. Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja; 6. Profil singkat Anggota DPR;	Sekretaris Jenderal DPR RI			√	√	Selama Berlaku	http://www.dpr.go.id/index/kontak http://www.dpr.go.id/setjen/tentang http://www.dpr.go.id/setjen/tentang http://www.dpr.go.id/setjen/struktur-organisasi http://www.dpr.go.id/akd/komisi http://www.dpr.go.id/anggota
2.	Program Reformasi Birokrasi	1. Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 - 2019; 2. Quick Wins Reformasi Birokrasi.	Sekretaris Jenderal DPR RI	2016		√	√	Selama Berlaku	http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformas-i-birokrasi-2015-2019-Roadmap-Reformasi-Birokrasi-2015-2019-1461748894.pdf http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformas-i-birokrasi-Quick-Win-Quick-Wins-Reformasi-Birokrasi-2015-2019-1461749003.pdf
3.	Program dan/atau Kegiatan	1. Program Legiaslasi Nasional 2014 - 2019	Badan Legislasi DPR RI	2014		√	√	Selama Berlaku	http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformas-i-birokrasi-Area-VII-Penguatan-Akuntabilitas-Kinerja-RKT-Setjen-DPR-RI-Tahun-2017-1472552119.pdf
		2. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2017	Sekretaris Jenderal DPR RI	2016		√	√	Selama Berlaku	http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformas-i-birokrasi-Area-VII-Penguatan-Akuntabilitas-Kinerja-RKT-Setjen-DPR-RI-Tahun-2017-1472552119.pdf
4.	Kinerja Badan Publik	Kinerja badan Publik terdiri dari: 1. Agenda Kerja DPR 2. Jadwal Kunjungan Masyarakat 3. Bentuk-Bentuk Layanan: - LPSE - Pengaduan Masyarakat - Pusat Penelitian - e-Jurnal Puslit - layanan Infomasi Publik - Perpustakaan DPR - Infografis - Kliping DPR 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai (LAKIP) 2016	Badan Musyawarah DPR RI Biro Pemberitaan Parlemen	2015 - 2017 2010 - 2017			√	5 Tahun	http://www.dpr.go.id/agenda
							√	5 Tahun	http://www.dpr.go.id/humas/kunjungan-jadwal
			Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat			√	5 Tahun	http://lpse.dpr.go.id/eproc/	
			Badan Keahlian DPR RI			√	5 Tahun	http://pengaduan.dpr.go.id/	
			Badan Keahlian DPR RI			√	5 Tahun	http://puslit.dpr.go.id/	
			Biro Pemberitaan Parlemen			√	5 Tahun	http://jurnal.dpr.go.id/	
			Pusat Data dan Informasi			√	5 Tahun	http://ppid.dpr.go.id/intro	
			Biro Pemberitaan Parlemen			√	5 Tahun	http://perpustakaan.dpr.go.id/catalog/	
Pusat Data dan Informasi			√	5 Tahun	http://www.dpr.go.id/berita/index/category/infografis				
		Sekretaris Jenderal DPR RI				√	1 tahun	http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/reformas-i-birokrasi-Area-VII-Penguatan-Akuntabilitas-Kinerja-LAKIP-Sekretariat-Jenderal-DPR-RI-Tahun-2015-	
5.	Laporan Keuangan Audited tahun 2013 - 2015 (tahun 2016 masih dalam proses di BPK)	Ringkasan Laporan Keuangan: ◇ Realisasi anggaran ◇ Neraca ◇ laporan Operasional ◇ Laporan Perubahan Ekuitas ◇ Catatan Atas Laporan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	2013 - 2015		√	√	5 Tahun	http://www.dpr.go.id/setjen/publikasi

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN										
6.	Laporan Akses Informasi	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik: <ul style="list-style-type: none"> ◊ Jumlah Permintaan yang diterima ◊ Jumlah pemberian dan pem= nolakan ◊ Jenis Pemohon ◊ Jumlah Sengketa 	PPID				√	5 Tahun	http://ppid.dpr.go.id/data/LAPORAN%20AKSES%20INFORMASI%20PUBLIK%20TAHUN%202016.pdf	
7.	Tata cara Permohonan Informasi Publik	Tata cara Permohonan Informasi Publik, terdiri dari <ol style="list-style-type: none"> 1. Alur Proses (tata cara memperoleh informasi Publik) 2. Hak dan kewajiban Pemohon dan Badan Publik 3. Tata Cara pengaduan dan Penyelesaian Keberatan 	PPID				√ √ √	Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku	https://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/7 https://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/6 https://ppid.dpr.go.id/index/statik/id/21	
8.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang	Informasi Tentang Tata Cara pengaduan Penyalahgunaan Wewenang, <ol style="list-style-type: none"> 1. Persekjen tentang whistleblowing system di Sekretariat jenderal DPR RI 2. Whistleblowing System di Setjen DPR RI 3. Pengaduan Masyarakat 4. Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan 	Inspektorat Utama Inspektorat Utama Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Mahkamah Kehormatan DPR	2015 2015 2014 2015			√ √ √ √	√ √ √ √	Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku	http://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/ittama-Internal-Peraturan-Sekretaris-Jenderal-DPR-RI-No.-9-Tahun-2015-tentang-Pedoman-Sistem-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-Tindak-Pidana-Korupsi-di-lingkungan-Setjen-DPR-RI-1460516356.pdf http://ittama.dpr.go.id/setjen/index/id/Whistleblowing-System-INSPEKTORAT-UTAMA http://pengaduan.dpr.go.id/index/alur http://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/perdpr11_2015_2.pdf
9.	Informasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan pengadaan secara Elektronik (LPSE) DPR RI	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	2006 - 2017			√		http://lpse.dpr.go.id/eproc/	
10.	Informasi tentang Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang sedang diproses Prolegnas 2. Regulasi yang telah disahkan: <ul style="list-style-type: none"> - UU - Peraturan DPR - Peraturan Sekjen DPR 	Badan Legislasi DPR RI Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	1946 - 2017 2009 - 2016			√ √ √	Selama Berlaku Selama Berlaku Selama Berlaku	http://www.dpr.go.id/jdih/uu http://www.dpr.go.id/jdih/peraturan-dpr Masih di portal pegawai	

Jakarta, Februari 2017
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si
Nip. 196507051991031003